

BAB II

DINAMIKA KONFLIK SUMBER DAYA AIR SUNGAI YORDAN DAN PENGATURAN INTERNASIONAL

Konflik sumber daya air Sungai Yordan yang melibatkan 3(tiga) entitas negara yakni Israel, Yordania dan Palestina telah berlangsung sejak lama. Keadaan geografis dan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Sungai Yordan dapat membawa keuntungan tersendiri bagi negara-negara daerah aliran Sungai Yordan dalam rangka pembangunan nasional. Adanya hal tersebut yang kemudian mampu memunculkan konflik lintas batas. Berbicara tentang alokasi air sungai, kurang jelasnya batas-batas wilayah atas pembagian alokasi air menjadi salah satu penyebab konflik sumber air. Konflik yang terjadi di daerah aliran Sungai Yordan memiliki dinamika tersendiri. Dinamika dimulai dari konflik Arab-Israel yang kemudian semakin lama semakin berkembang dan lebih kompleks. Dinamika konflik yang terjadi telah memunculkan berbagai peraturan internasional termasuk perjanjian internasional atas pembagian alokasi air bagi negara Israel, Yordania dan Palestina itu sendiri.

2.1 Karakteristik Sungai Yordan

Sungai Yordan mengalir sejauh 18.500 km² memiliki hulu sungai yang berasal dari tiga sumber, yakni Dan, Baniyas dan Hasbani, dimana bertemu pada titik 5 km sebelah selatan dari perbatasan Israel utara kemudian mengalir ke selatan melalui Lembah Hula(*Hula Valley*) untuk bergabung Danau Tiberias atau Laut Galilea(*Sea Of Galilee*)(Gambar 1.1). Dengan aliran Sungai Yordan dari

Danau Tiberias, Sungai Yordan bagian bawah(*The Lower Jordan River*) menerima air dari anak sungai utama yakni Sungai Yarmouk. Sungai Yarmouk berasal di Yordania, kemudian membentuk perbatasan antara Yordania dan Suriah dan kemudian antara Yordania dan Israel, sebelum mengalir ke Sungai Yordan bagian bawah(*The Lower Jordan River*). Sungai ini kemudian terus mengalir ke selatan, membentuk perbatasan antara Israel dan Tepi Barat dibagian barat sungai dan Yordania di timur sungai dan pada akhirnya berakhir di Laut Mati.

Bagian atas Sungai Yordan(*The Upper Jordan River*), sebelah utara Danau Tiberias, berkontribusi atas sebagian besar air yang dihasilkan dibandingkan bagian bawah Sungai Yordan(*The Lower Jordan River*), yang mewakili 40 persen dari seluruh *Jordan Basin*. Sungai Yarmouk yang merupakan jalur air utama di bagian bawah dari lembah, bergabung dengan Sungai Yordan di sebagian daerah yang diduduki oleh Israel. Selama musim panas, beberapa sisi sungai kering sepenuhnya dan pada saat musim dingin tiba, disaat itulah Sungai Yordan menerima pasokan air tambahan sehingga merupakan salah satu aspek yang paling penting dari pengelolaan sumber daya air di Sungai Yordan. Jika perairan ini tidak dialihkan atau disimpan, air akan mengalir langsung ke Laut Mati.

Besarnya potensi alam yang dapat dimanfaatkan dari Sungai Yordan tersebut yang kemudian dapat menyebabkan masing-masing negara melakukan tindakan dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional dilandasi oleh beberapa faktor mengapa negara-negara tersebut mengambil tindakan yang akan menghasilkan keuntungan tersendiri bagi negaranya dalam pencapaian kepentingan nasional tersebut.

2.2 Faktor Konflik Sumber Daya Air Sungai Yordan

Negara yakni sebagai aktor memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional. Kehidupan warga negara dijamin dan dilindungi oleh negara karena negara sendiri merupakan sesuatu yang esensial. Kebutuhan suatu negara dapat menciptakan konsep kepentingan nasional. Kepentingan nasional berkaitan dengan perilaku luar negeri suatu negara. Adanya kepentingan nasional berkesinambungan dengan konsep *power* atau kekuatan yang ingin diciptakan masing-masing negara.

Menurut Morgenthau, kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain (Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, 1994). Untuk menciptakan kekuasaan dan pengendalian tersebut dapat diciptakan melalui beberapa cara yakni diantaranya melalui kerjasama maupun melalui teknik pemaksaan. Dalam hal ini bahwasanya *power* maupun *national interest* sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional. Lebih lanjut Morgenthau menjelaskan bahwa kepentingan nasional adalah hasil kompromi dari kepentingan-kepentingan politik yang saling bertentangan; hal ini bukan suatu *ideal* yang dicapai secara abstrak dan saintifik, tetapi merupakan hasil dari persaingan politik internal yang berlangsung secara terus menerus. Pada akhirnya dibutuhkan peran tanggung jawab pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam mendefinisikan dan menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diarahkan untuk kepentingan nasional.

Identitas suatu negara dijelaskan melalui kepentingan-kepentingan nasional yang ingin dicapai masing-masing negara. James N. Rosenau menjelaskan bahwa istilah kepentingan nasional dipakai untuk dua kegunaan: *pertama*, sebagai istilah *analitis* untuk “menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri”; dan *kedua*, sebagai *alat tindakan politik*, yaitu sebagai “sarana untuk membenarkan, mengecam, atau mengusulkan suatu kebijaksanaan” (Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, 1994).

Munculnya konflik Arab-Israel yang kemudian dapat membuat permasalahan semakin kompleks telah merujuk pada masing-masing kepentingan nasional setiap negara yakni Israel, Yordania dan Palestina . Kepentingan nasional dianggap salah satu alasan penting bagaimana masing-masing negara dalam mengambil alih keuntungan terhadap sumber air yang berasal dari Sungai Yordan. Masing-masing negara yang terlibat konflik telah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mempertahankan kekuasaan bahkan memperluas kekuasaannya di wilayah aliran Sungai Yordan. Pengendalian atas kekuasaan tersebut melalui konflik perluasan alokasi aliran air Sungai Yordan untuk setiap negara. Terdapat beberapa faktor yang secara tidak langsung menjadikan masing-masing negara melakukan berbagai cara untuk mencapai kepentingan nasional dalam pemanfaatan sumber daya air. Terdapat faktor-faktor internal dalam rangka pencapaian kepentingan setiap negara.

a. Faktor Ekonomi

Sungai Yordan memiliki peranan penting bagi miliaran orang di negara-negara yang terletak di daerah aliran Sungai Yordan. Pengalihan lebih dari 96% air segar dengan debit dalam jumlah besar serta tidak adanya penyelesaian atas limbah yang semakin meluas dapat menjadi ancaman dan dapat merusak ekosistem lembah Sungai Yordan. Israel, Yordania dan Palestina telah mengalihkan perairan untuk penggunaan domestik dan pertanian. Secara historis, Sungai Yordan menjadi tempat pertemuan dan tempat penyeberangan berbagai flora dan fauna. Bahkan Sungai Yordan merupakan akses bagi manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Lembah Yordan memiliki ekosistem lahan subur yang merupakan jantung biologis daerah pada umumnya. Tetapi dalam 50 tahun terakhir, aliran tahunan Sungai Yordan telah menurun dari lebih dari 1,3 miliar meter kubik per tahun sampai kurang dari 30 juta meter kubik (FoEME, 2001).

Tabel 2.1
Penggunaan dan Ketersediaan Air Sungai Yordan

Source: *Water for Peace in the Jordan Watershed*
http://lawlibrary.unm.edu/nrj/33/3/11_wolf_peace.pdf

NEGARA	DEBIT AIR Million Cubic Meter (MCM/year)		PRESENTASE PEMANFAATAN AIR SUNGAI YORDAN(%)		
	Ketersediaan Air	Potensi Alam	Pertanian	Domestik/kebutuhan sehari-hari	Industri
Israel	1800	1600	73	22	5
Yordania	870	870	85	10	5
Tepi Barat	115	115	78	22	-
Gaza	95	60	85	15	-

Bedasarkan tabel 2.1 menjelaskan bahwa negara-negara daerah aliran sungai memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya air Sungai Yordan. Presentase pemanfaatan air Sungai Yordan oleh Israel, Yordania dan Palestina menunjukkan bagaimana sumber air digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Dari pemanfaatan air sungai yang digunakan untuk pertanian, domestik dan industri secara tidak langsung dapat menunjang pembangunan ekonomi bangsa. Pasokan air Sungai Yordan telah berdampak pada kemajuan bangsa dalam memanfaatkan sumber daya air untuk kepentingan nasional masing-masing negara yang terlibat. Tabel diatas menunjukkan eksistensi setiap negara dalam memanfaatkan sumber daya air Sungai Yordan.

Hal ini membuktikan adanya kepentingan nasional masing-masing negara dalam pemanfaatan sumber air Sungai Yordan salah satu motifnya adalah untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang berlangsung di setiap negara akan membawa dampak pada pembangunan nasional masing-masing negara. Dari hal tersebutlah, bagaimana kepentingan nasional dapat memicu terjadinya konflik lintas negara karena kepentingan nasional yang ingin dicapai setiap negara salah satunya adalah pengembangan ekonomi negara. Pengembangan ekonomi negara-negara daerah aliran Sungai Yordan salah satunya dapat dicapai melalui pemenuhan standar kebutuhan masing-masing negara dengan pemanfaatan secara maksimal potensi yang ada pada sumber daya air Sungai Yordan.

b. Faktor Politik

Tiga entitas negara yang berkonflik dalam upaya perebutan sumber daya air Sungai Yordan telah membawa pada ranah perpolitikan didalamnya. Sungai Yordan telah menjadi sumber daya air terbesar yang dimiliki oleh Israel, Palestina dan Yordania. Negara-negara tersebut melakukan *explore* terhadap sumber daya air Sungai Yordan yang dimana hal tersebut justru menimbulkan perselisihan diantara negara-negara daerah aliran sungai. Terjadinya gesekandiantara negara-negara daerah aliran sungai dalam pemanfaatan sumber daya air tersebut karena sungai Yordan hanya satu dan batas-batas wilayah pembagian alokasi air yang tidak jelas. Hal tersebut menjadikan negara-negara yang berada diwilayah aliran Sungai Yordan yang dapat menimbulkan konflik adalah pembagian sungainya. Pembagian sungai yang cenderung tidak jelas menjadikan border atau batasan wilayah terhadap Sungai Yordan yang dapat memicu konflik diantara negara-negara daerah aliran sungai. Setiap negara didaerah Sungai Yordan memiliki hegemoni dalam pencapaian kepentingan nasionalnya melalui *explore* Sungai Yordan.

Tabel 2.2
Wilayah Negara DAS Yordan

Source: <http://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/jordan/index.stm>

Basin	Area		Countries or territories included	Area of country in basin (km ²)	As % of total area of the basin
	km ²	% of the Middle East			
Jordan	18 500	0.28	Jordan	7 470	40.4
			Israel	6 830	36.9
			Syrian Arab Republic	1 910	10.3
			West Bank	1 620	8.8
			Lebanon	670	3.6

Sungai Yordan merupakan sebuah sistem hidrologi lintas batas luas total sekitar 18.500 km². Yordania merupakan negara dengan kepemilikan wilayah terbesar di daerah aliran sungai Yordan yakni mencapai 7.470 km², di peringkat kedua terdapat Israel dengan luas wilayah 6.830 km² dan diikuti oleh tiga negara lainnya dengan masing-masing wilayah yakni Suriah 1.910 km², Palestina 1.620 km², dan Lebanon sebesar 670 km². Negara-negara yang termasuk dalam wilayah aliran Sungai Yordan yakni Yordania, Israel, Suriah, Tepi Barat (Palestina), dan Lebanon memiliki masing-masing total wilayah pembagian 40% berada di Yordania, 37% berada di Israel, 10% berada di Suriah, 9% di Tepi Barat, dan 4% berada di Lebanon (Tabel 2.2) (FAO, 2009).

Dari tabel di atas diketahui bahwasanya telah diatur batasan wilayah masing-masing negara daerah aliran Sungai Yordan. Batasan yang telah diatur secara jelas dapat menimbulkan konflik. Dalam kasus ini, walaupun ada *border* atau batasan yang jelas terhadap pemanfaatan air Sungai Yordan, namun masing-masing negara justru melakukan *over-eksploitasi* terhadap Sungai Yordan. Hal ini terjadi pada Yordania yang telah membangun proyek irigasi intensif dimana mengalihkan air Sungai Yarmouk yang merupakan anak Sungai Yordania dan membangun *East Ghor Canal*. Di satu sisi, Israel membangun *National Water Carrier* (NWC), yakni pasokan air nasional bagi Israel (Aaron T. Wolf and Joshua T. Newton, 2007). Sedangkan Palestina sendiri telah memanfaatkan sumber daya air Sungai Yordan untuk sistem irigasi lokal. Metode yang digunakan adalah *pumping* dan menyalurkan ke sistem irigasi langsung. Hal tersebut menunjukan bagaimana masing-masing negara dengan kepentingan nasional masing-masing

telah melakukan explore berlebih terhadap Sungai Yordan walaupun sudah ada aturan mengenai border atau batasan wilayah untuk negara-negara daerah aliran Sungai Yordan. Dari hal tersebut yang dimana masing-masing negara telah melakukan tindakan diluar batas aturan yang kemudian dapat menyebabkan konflik terkait alokasi sumber air Sungai Yordan.

c. Faktor Sosial-Budaya

Sungai Yordan merupakan simbol kepentingan budaya, agama dan geografis. Sungai Yordan dianggap sebagai simbol berbagai kebudayaan dan agama yakni Islam, Nasrani, dan Yahudi yang merupakan agama-agama yang tersebar didaerah-daerah aliran lembah Sungai Yordan selama lebih dari ribuan tahun telah berkembang di peradaban manusia di wilayah tersebut. Sungai Yordan memiliki peranan penting bagi miliaran orang dari beragam agama dan negara-negara khususnya negara yang terletak di daerah aliran Sungai Yordan. Pengalihan lebih dari 96% air segar dengan debit dalam jumlah besar serta tidak adanya penyelesaian atas limbah yang semakin meluas dapat menjadi ancaman dan dapat merusak ekosistem lembah Sungai Yordan.

Tabel 2.3

Proyeksi Populasi

Source: *Water for Peace in the Jordan Watershed*
http://lawlibrary.unm.edu/nrj/33/3/11_wolf_peace.pdf

Entitas	Populasi Tahun 1991	Annual Growth Rate	Extrapolated 2020 Population
Israel	4.800.000	1.6%	8.850.000
Jordan	3.600.000	3.5%	9.760.000
West Bank	900.000	3.4%	2.370.000
Gaza	600.000	3.4%	1.580.000

Table 2.3 menunjukkan populasi manusia di negara-negara daerah aliran Sungai Yordan. Tingkat populasi manusia yang tersebar di daerah aliran Sungai Yordan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Tingkat populasi manusia yang tinggi untuk memenuhi standar kehidupan, maka secara tidak langsung dapat menjadi ancaman lingkungan hidup. Tabel 2.3 menunjukkan pergerakan angka pertumbuhan populasi manusia di daerah Sungai Yordan yang memprediksi terjadinya peningkatan di tahun 2020 yakni sebesar 1.6% hingga 3.5% di masing-masing negara. Tingginya perkiraan populasi manusia di masa yang akan datang, disamping belum ada penyelesaian konflik sumber air dan penyelesaian terhadap limbah Sungai Yordan, hal ini yang kemudian akan disebut sebagai ancaman lingkungan hidup.

Negara-negara daerah aliran Sungai Yordan terutama Israel, Yordania dan Palestina melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan tercapainya kepentingan nasional. Terdapat berbagai faktor internal seperti faktor ekonomi, politik dan sosial-budaya yang kemudian menjadikan konflik persaingan antar negara dimana dalam mencapai kepentingan nasional yakni kepemilikan sumber daya air Sungai Yordan menyebabkan konflik menjadi lebih kompleks.

2.3 Sejarah Perkembangan Konflik Sumber Air Sungai Yordan

Jika dilihat ke belakang, konflik yang terjadi antara Arab dan Israel salah satunya dipengaruhi oleh masuknya invasi Barat ke dunia Arab. Salah satunya adalah dalam Perang Dunia I, Inggris berhasil meruntuhkan kekuatan Turki Utsmani dan berhasil memperluas wilayahnya ke tanah Arab. Hingga pada

akhirnya abad 19 menjadi tahun dimana Inggris berhasil membuka peluang bagi kaum Yahudi dalam mencapai cita-citanya yakni memiliki tanah yang dijanjikan melalui *Deklarasi Balfour*. Abad ke 19 merupakan awal mula terbentuknya gerakan Zionis. Salah satu faktor merebaknya dan meluasnya konflik Arab-Israel salah satunya disebabkan oleh adanya *Deklarasi Balfour*.

2.3.1 Deklarasi Balfour Sebagai Awal Konflik Arab-Israel

Deklarasi Balfour secara resmi dideklarasikan tanggal 2 November 1917 dimana merupakan keputusan bagi Inggris untuk mendukung pendirian negara Israel. Terbentuknya *Deklarasi Balfour* merupakan keputusan yang keluar dari sebuah surat yang ditulis oleh Sekretaris Jenderal Luar Negeri, Lord Balfour, kepada Lord (Lionel) Rothschild sebagai Kepala Kehormatan Federasi Zionis di Inggris dan Irlandia. Isi surat tersebut adalah

Balfour Declaration, November 2, 1917 (Levine, 2000)

Dear Lord Rothschild:

I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet:

His Majesty's Government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavors to [advance] the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may [damage] the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.

Yours,

Arthur James Zimmerman

Dalam surat tersebut berisikan hal-hal penting yang menunjukkan dukungan Inggris terhadap pendirian negara Yahudi terhadap Palestina. Didalamnya

menyatakan bahwasanya pemerintah Inggris akan membantu mendirikan wilayah nasional bagi orang-orang Yahudi, di Palestina, dan akan memfasilitasi hal-hal dalam rangka tercapainya tujuan tersebut, pemerintah Inggris tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan untuk hak sipil dan keagamaan bagi komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, serta berjanji untuk tidak akan mengganggu status atau hak-hak orang Yahudi yang ingin tetap tinggal di luar wilayah Palestina. Pada bulan April tahun 1920, dalam rapat Dewan Tertinggi Liga Bangsa-Bangsa (sekarang PBB) di San Remo, Italia, Inggris mendesak dan memperoleh mandat atas Palestina. Desakan Inggris itu disetujui oleh LBB pada bulan Juli 1922, dan diberlakukan pada bulan September 1923. Termasuk didalamnya Deklarasi Balfour (Khomeini, 2004). Selama tahun 1920-an hingga 1930-an, terutama setelah Hitler berkuasa di Jerman, imigran Yahudi dipindahkan ke Palestina.

Hubungan antara Yahudi dan Arab di Palestina menjadi semakin buruk di bawah mandat Inggris. Para pejabat Inggris mencoba untuk menenangkan kedua belah pihak, tapi mendapat perlawanan dari masing-masing tentara Arab dan Yahudi. Inggris tidak dapat membujuk orang-orang Arab dan Yahudi untuk menyetujui bergabung sebagai negara Arab-Yahudi di Palestina. Sehingga yang terjadi adalah Inggris akhirnya menyerah dan meminta PBB untuk mengambil sikap atas situasi yang memanas antara Arab dan Israel. Pada 29 November 1947, Majelis Umum PBB menyetujui rencana untuk partisi (pembagian) Palestina menjadi Yahudi dan negara Arab, keduanya bergabung dalam serikat ekonomi. Hingga pada tahun tersebut pula terdapat sebanyak 35% penduduk yang

menempati Palestina adalah Yahudi. *The World Zionist Organizations*(WZO) dipromosikan sebagai upaya dalam pencapaian dan persiapan untuk pembentukan sebuah negara Yahudi atas wilayah Arab(Aaron T. Wolf and Joshua T. Newton , 2007).Sejak saat itu, konflik yang melibatkan negara-negara Arab dan Israel semakin berkepanjangan dan menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *Deklarasi Balfour* sebagai awal gerakan Zionisme yang kemudian merupakan faktor awal penyebab terjadinya konflik Arab-Israel.

2.3.2 Johnston Water Plan Sebagai Upaya Damai Atas Konflik Sumber Air

Adanya gerakan Zionisme yang menjadi awal konflik Arab-Israel menjadi lebih kompleks, salah satunya ialah masalah perebutan sumber daya air Sungai Yordan. Pada tahun 1951, beberapa negara membuat rencana sepihak terkait pemanfaatan sumber daya air bagi daerah aliran Sungai Jordan. Negara-negara Arab mulai membahas eksploitasi secara terorganisir dari dua sumber air sebelah utara yakni Sungai Yordan-Sungai Hasbani dan Sungai Banias(FAO, 2009). Di sisi lain, pihak Israel membuat suatu rencana yang disebut "*All Israel Plan*" dimana termasuk didalamnya pengeringan *Huleh Lake*, pengalihan serta pembangunan saluran sumber air yang berasal dari Sungai Yordan utara.

Yordania mengumumkan rencana untuk mengairi daerah *East Ghor* dengan sumber air yang berasal dari Sungai Yordan dengan membuka jalur melalui Sungai Yarmuk. Pada saat Yordania membuat rencana tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Israel adalah menutup gerbang bendungan yang ada di selatan Laut Galilea dan mulai menguras *Huleh Lake*(Haddadin, 2014). Hal yang dilakukan oleh Israel termasuk melanggar hak zona demiliterisasi dengan Suriah.

Tindakan ini yang kemudian menyebabkan serangkaian pertempuran di perbatasan antara Israel dan Suriah pada tahun 1951.

Dengan latar belakang ini, Presiden Amerika Serikat, Dwight Eisenhower mengirim utusan khusus Eric Johnston ke Timur Tengah pada bulan Oktober 1953 mencoba untuk menengahi penyelesaian yang komprehensif atas permasalahan alokasi sistem air Sungai Yordan dengan menjalin kerjasama antara empat negara - Israel, Yordania, Suriah dan Lebanon dan merancang rencana pembangunan daerah. Rencana tersebut berkaitan dengan pembangunan untuk dua bendungan yang akan dibangun di Sungai Yarmuk (anak Sungai Yordan bagian utara) dan pembagian pasokan air antara negara-negara daerah aliran sungai.

Proposal awal *Johnston's Plan* didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh *Charles Main* dan *Tennessee Valley Authority (TVA)* atas permintaan PBB untuk mengembangkan pembangunan daerah sumber daya air dengan menggunakan pendekatan regional untuk menentukan alokasi air (Aaron T. Wolf and Joshua T. Newton, 2007). Proposal tersebut kemudian dikenal sebagai *Main Plan*. Tujuan utama dari *Main Plan* tersebut termasuk pembuatan bendungan kecil di Hasbani, Dan, dan Baniyas, bendungan ukuran sedang (175 MCM untuk penyimpanan) di Maqarin, penyimpanan cadangan di Laut Galilea, dan kanal aliran air di kedua sisi Lembah Yordan. Alokasi awal memberi Israel 393 MCM per tahun, Yordania (termasuk Tepi Barat) 774 MCM per tahun, dan Suriah 45 MCM per tahun (Lihat Tabel 2.4).

Selain itu, *Main Plan* dirancang hanya sebagai pengelolaan alokasi air di Sungai Yordan, meskipun realita yang terjadi bahwasanya masing-masing negara memiliki ide yang berbeda tentang bidang-bidang tertentu dalam kaitanya dengan pengolahan dan pengalihan sumber air Sungai Yordan. Menanggapi adanya pengaturan internasional melalui *Main Plan* yang telah direncanakan sebelumnya, masing-masing negara justru membuat rekayasa tentang pengalokasian sumber air. Masing-masing negara memiliki rencana tersendiri terhadap jumlah alokasi air yang masuk ke negaranya. Pihak Israel maupun Liga Arab menengaskan ketidaksetujuan ataupun kontradiktif terhadap proposal *Main Plan* yang diusulkan, sehingga masing-masing pihak (Israel dan Liga Arab) membuat “*Plan*” tersendiri.

Tabel 2.4

Alokasi Air dari Johnston Plan

Source: Middle East Water Conflicts and Directions for Conflict Resolution
<http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/16240/1/dp12.pdf>

Plan	Israel	Yordania	Lebanon	Suriah
	(MCM/Year)			
Main	393	774	0	45
Cotton (Israel)	1.290	575	450	30
Arab	182	698	35	132
Unified	400	720*	35	132

*East Bank 505 and West Bank 215.

Main Plan difokuskan hanya pada penggunaan air Sungai Yordan dan tidak termasuk Sungai Litani. Tanggapan Israel terhadap *Main Plan/TVA*, insinyur Amerika Serikat, JS Cotton (bekerja sebagai konsultan untuk Israel pada saat itu) meninjau rencana dan datang dengan versi berbeda. Pengecualian ini tidak dapat

diterima oleh pihak Israel, yang menginginkan rencana tersebut termasuk sumber air Sungai Litani yang harusnya juga menjadi pertimbangan untuk kebutuhan irigasi Israel di gurun Negev. Perkiraan Cotton sumber daya air yang tersedia untuk digunakan, termasuk Litani, sebesar 2345,7 MCM (lihat Tabel 2.4 untuk alokasi)(Haddadin, 2014).

Main Plan tersebut juga ditanggapi oleh pihak Arab dimana dengan sikap Arab: pertama, Arab memandang misi Johnston sebagai manifestasi lain dari kebijakan Amerika yang pro terhadap Israel; kedua Arab memandang niat Amerika tidak sebagai isyarat kemanusiaan untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi di seluruh cekungan Sungai Yordan, melainkan sebagai upaya untuk meningkatkan kerjasama Arab dengan Israel dan merayu orang Arab ke mengakui negara Yahudi; ketiga, Arab takut bahwa niat Amerika Serikat adalah untuk menampung pengungsi Palestina di Lembah Yordan sebagai pengganti melaksanakan Resolusi PBB No 194 pada 11 Desember 1949, yang menyerukan pemulangan dan kompensasi pada para pengungsi(Haddadin, 2014). Perhatian utama untuk orang-orang Arab adalah komitmen Arab yang tidak mengakui negara Israel maupun untuk bekerja sama dengan Israelsebelum penyebab konflik yang memadai diselesaikan.

Meskipun keadaan saat itu tegang antara Israel-Arab, *Main Plan Johnston* adalah untuk mengatasi ketakutan dari pihak terkait dan merancang rumusan *Main Plan/TVA* agar semua pihak mendapatkan keadilan. Hingga pada akhirnya, pada 12 Januari 1953 Kepemimpinan Mesir mampu meyakinkan Komite Politik Liga Arab untuk membangun Komite Teknis Arab(Lebanon, Suriah, Yordania dan

Mesir) untuk melanjutkan studi pemanfaatan air sungai Yordan. Komite Liga Arab mengadakan pertemuan di Kairo dari 14-16 Januari dan meletakkan spesifikasi untuk Arab Plan untuk melawan *Main Plan/TVA*. Rencana Arab (*Arab Plan*) saham air dialokasikan untuk semua negara riparian, termasuk Israel (lihat Tabel 2.4). Dalam *Arab Plan* menekankan irigasi tanah dalam cekungan Sungai, dan menentang pengalihan air di luar itu.

Johnston bekerja hingga akhir 1955 untuk proposal perdamaian Arab-Israel dalam *Unified Plan*. Proposal perdamaian tersebut didukung oleh tawaran AS untuk mendanai dua pertiga dari biaya pengembangan. Dalam rencananya, akan membahas hal-hal yang menjadi permasalahan dari kedua belah pihak, dan bertujuan untuk mencapai kata sepakat dengan melakukan pengawasan bersama terhadap alokasi air Sungai Yordan bagi negara-negara yang terlibat. Dalam "*Unified Plan*", Johnston mempertimbangkan dalam upaya mendamaikan permasalahan alokasi sistem air Sungai Yordan dengan proposal "*Unified Plan*" dengan beberapa perubahan pembagian alokasi air Sungai Yordan terhadap negara-negara yang terlibat (Lihat Tabel 2.4).

Meskipun masing-masing negara belum pernah bertemu secara langsung dalam negosiasi ini, semua negara yang terlibat sepakat tentang perlunya pendekatan regional. Arab setuju untuk mengizinkan "*out-of-basin transfer*" pada integrasi Litani yang dilakukan Israel (Wolf A. T., 1996). Pada awalnya Arab menyatakan keberatan namun pada akhirnya pihak Arab sepakat untuk mengadakan penyimpanan air di bendungan Maqarin Dam dan Laut Galilea selama tidak ada pihak yang memiliki kontrol fisik secara penuh atas saham yang

tersedia. Posisi Israel yang semula keberatan namun pada akhirnya sepakat untuk melakukan penarikan atas pengawasan internasional dan konstruksi pembangunan (Haddadin, 2014). Alokasi air yang diatur dalam “*Unified Plan*”, kemudian dikenal sebagai “*Johnston Plan*”, termasuk 400 MCM per tahun untuk Israel, 720 MCM per tahun ke Yordania, 35 MCM per tahun ke Libanon, dan 132 MCM per tahun untuk Suriah.

2.3.3 Ketidakefektifan *Johnston Plan* dan Pecahnya *Six Day War*

Momentum dalam ranah politik *Johnston Plan* tidak pernah diratifikasi sebelumnya. Karena perjanjian akhir yang tidak pernah tercapai, banyak perdebatan yang terjadi dalam menetapkan keputusan akhir dari *Johnston Plan*. Disatu sisi, *Johnston Plan* bukan merupakan sebuah perjanjian formal antara para riparians ataupun antara riparians dan Amerika Serikat (Soslund, 2007). Tetapi, komite dari kedua belah pihak yakni Israel dan Yordania telah menerima “*Unified Plan*”. Namun demikian, Israel dan Yordania umumnya berpegang pada alokasi *Johnston Plan* dan perwakilan komite dari kedua negara telah bertemu secara rutin sebanyak dua sampai tiga kali dalam setahun untuk mendiskusikan perkembangan laju aliran dan alokasi Sungai Yordan dan Sungai Yamurk di suatu pertemuan yang disebut “*Picnic Table Talks*”.

Dalam retrospeksi, sejumlah masalah serius dapat teridentifikasi dalam negosiasi *Johnston*. Yang terjadi adalah pembagian alokasi jumlah air di daerah aliran sungai tidak dianalisis secara keseluruhan. *Groundwater* yang merupakan salah satu sumber utama pemasukan air bagi Israel dan Palestina, realitanya tidak

ada aturan yang membawahi tentang negosiasi dan rencana untuk alokasi *groundwater*. Alokasi dan kontrol *groundwater* telah menjadi sumber konflik antara Israel dan Palestina sejak itu (Berland, 2007).

Mengingat tingkat ketegangan politik dan tahap genting keberadaan Israel pada saat itu, dapat diketahui bahwa negosiasi hanya berfokus pada Israel dan negara-negara yang menggunakan air dari Sungai Yordan. Masuknya Palestina di meja perundingan hanyalah sebuah prasyarat untuk menemukan solusi bagi konflik Arab-Israel. Dalam gagalnya *Johnston Plan* yang menjadi faktor lain adalah kurangnya perhatian terhadap dimensi negosiasi politik. Pada akhirnya *Johnston Plan* menjadi aspek politik dari negosiasi yang membawa Israel-Arab berhenti menyepakatinya. Orang-orang Arab tidak mau menerima rencana pengalokasian air ke Israel karena akan dianggap sebagai langkah *de facto* melegitimasi hak Israel untuk berkembang. Tanpa ketentuan dalam negosiasi ini atau mekanisme untuk mempromosikan kepercayaan dan keyakinan, maka *Johnston Plan* dapat menjadi aspek ketegangan politik.

Terlepas dari hal tersebut, Israel dan Yordania sebagai hasil dari negosiasi Johnston, dekade berikutnya merupakan periode konflik intens antara Yordania dan Israel dimana baik pihak Israel maupun Yordania telah mengembangkan pengelolaan sumber daya air secara sepihak yang dilakukan secara terus menerus. Yordania mengumumkan rencana untuk mengalihkan bagian dari Sungai Yarmouk melalui *East Ghor Canal* untuk mengairi area *East Ghor* dari Lembah Yordan. Sebagai tanggapan, Israel memulai pembangunan pemasokan air nasional Israel yakni, *National Water Carrier*(NWC) pada tahun 1953. Konstruksi tersebut

akan mengalihkan air dari daerah aliran Sungai Yordan menuju ke gurun Negev(Aaron T. Wolf and Joshua T. Newton , 2007).

Pada tahun 1964, NWC dibuka dan mulai mengalihkan air dari lembah Sungai Yordan. Adanya pengalihan sumber air ini kemudian memicu pergelaran KTT Arab tahun 1964, di mana sebuah rencana dibuat untuk memulai mengalihkan hulu Sungai Yordan ke Suriah dan Yordania. Dari tahun 1965 sampai 1967 Israel menyerang proyek konstruksi di Suriah yang telah direncanakan pihak Arab. Bersama dengan faktor-faktor lain konflik ini meningkat menjadi Perang Enam Hari pada 1967 ketika Israel menghancurkan proyek pengalihan Suriah dan mengambil kontrol dari dataran tinggi Golan, Tepi Barat, dan Jalur Gaza. Ini memberikan kontrol Israel atas hulu sungai Yordan dan sumber daya yang signifikan lain. Konflik dengan intensitas rendah terus bergilir selama dua tahun ke depan tanpa resolusi yang menyebabkan konflik tersebut mengarah ke perang.

Pada bulan Juni 1967, terjadinya *Six Day War* salah satu motifnya adalah perebutan sumber air Sungai Yordan. Israel menyerang Mesir, Suriah, Yordania dan Irak dan dalam waktu enam hari itu telah merebut wilayah Dataran Tinggi Golan dari Suriah, Gaza dan Semenanjung Sinai dari Mesir dan Tepi Barat dari Yordania. Perang secara radikal mengubah batas-batas Israel dan dalam melakukan hal itu menjadi pemain dominan mengendalikan sebagian besar sumber daya air dari daerah aliran Sungai Yordan. Israel berhasil memperluas wilayahnya dua dari pertiga hulu Sungai Yordan, dan melalui akuisisi Tepi Barat,

telah memperoleh akses ke tiga akuifer utama di wilayah ini umumnya dikenal sebagai *Central Highland Aquifer* atau Gunung Aquifer (Berland, 2007).

Dinamika konflik yang melibatkan Israel, Yordania dan Palestina telah membawa pada permasalahan internasional. Pengaturan Internasional tentang alokasi sumberdaya air sungai Yordan telah diatur yang tujuannya untuk membagi sama rata alokasi sumber air ke negara-negara daerah aliran Sungai Yordan ternyata belum mampu mengatasi konflik Arab-Israel. Bahkan dari gagalnya beberapa pengaturan internasional tersebut, puncaknya adalah pecahnya Perang Enam Hari atau *Six Day War* yang salah satu motifnya adalah perebutan sumberdaya air Sungai Yordan. Akibat pecahnya *Six Day War* tersebut hingga membawa dunia internasional menaruh perhatian secara khusus. Hingga pada akhirnya muncul resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai alat untuk perdamaian bagi negara-negara yang berkonflik.